

ANALISIS KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DI PULAU SUMATERA

*Taryono
Hendro Ekwarso*

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Riau Km 12,5 Panam

ABSTRAK

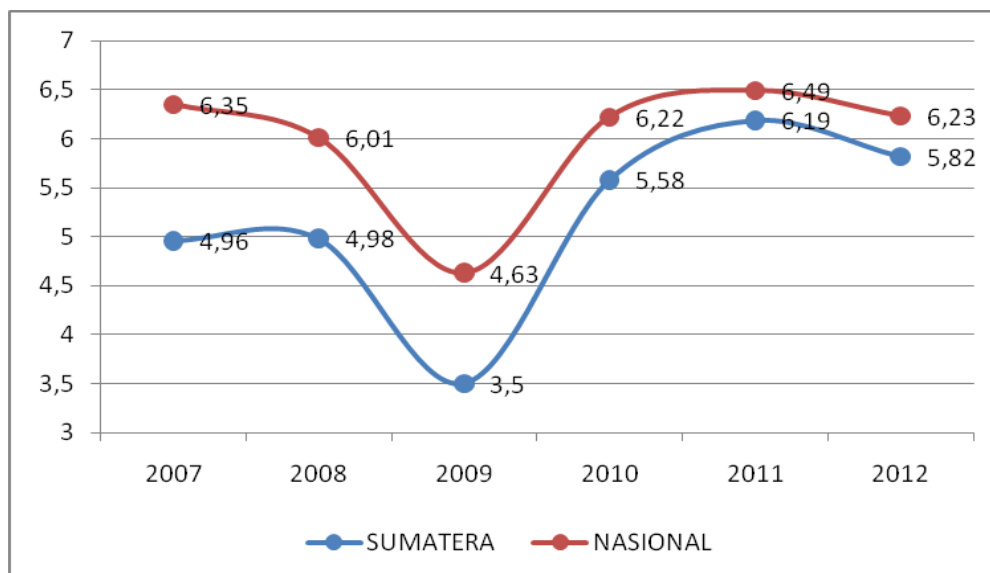
Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik dapat mendorong tumbuhnya kegiatan investasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan infrastruktur di Pulau Sumatera. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan variabel yang dianalisis meliputi infrastruktur jalan, listrik, telekomunikasi dan air bersih.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap tahunnya panjang jalan di Pulau Sumatera tumbuh sebesar 3,81%. Selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 panjang jalan negara bertambah 980 Km, jalan provinsi bertambah sepanjang 497 Km, jalan kabupaten/kota bertambah sepanjang 9.944 Km. Sehingga ketersediaan infrastruktur jalan di Pulau Sumatera pada tahun 2010 sepanjang 161.326 Km. Jumlah pelanggan listrik di Pulau Sumatera selama periode 2009-2011 tumbuh sebesar 19,29% dengan konsumsi listrik meningkat sebesar 333,50 KWH/kapita. Namun, persebaran listrik antardaerah di Pulau Sumatera masih belum merata, dengan rasio elektrifikasi menurut wilayah terendah 56,68% dan tertinggi 87,21%. Belum seluruh wilayah di Pulau Sumatera dapat diakses telpon kabel maupun Handpone. Pada tahun 2011, baru sebanyak 3.884 desa/kelurahan yang terdapat telpon kabel dan masih terdapat sekitar 3,71% desa/kelurahan belum dijangkau sinyal HP. Pada umumnya di wilayah Sumatera (62%) desa menggunakan Pompa Listrik/Tangan/Sumur sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan domestik masyarakat.

Keywords :Infrastruktur, Jalan, Listrik, Air Bersih

I. PENDAHULUAN

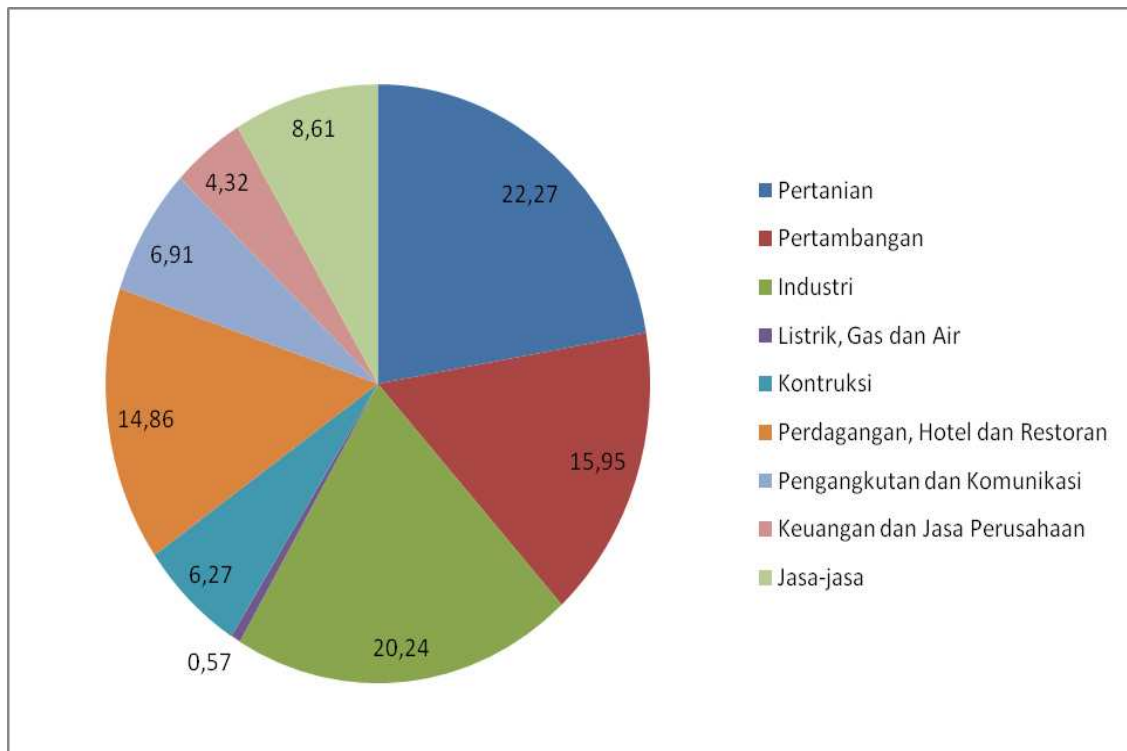
Kondisi ekonomi global yang mengalami krisis pada tahun 2009 turut dirasakan dalam perekonomian Nasional maupun Pulau Sumatera. Penurunan pertumbuhan ekonomi Nasional sudah dirasakan mulai tahun 2007 yaitu dari 6,35% turun menjadi 6,01% tahun 2008 dan menunjukkan penurunan yang lebih tajam pada 2009 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,63%. Kondisi yang relatif sama juga dialami dalam perekonomian Pulau Sumatera yang mulai merangkak tumbuh di tahun 2008 yaitu 4,98% dari tahun sebelumnya 4,96% pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Sumatera turun menjadi 3,50%.



Gambar 1 : Pertumbuhan Ekonomi Sumatera dan Nasional Tahun 2007-2012

Secara umum kondisi perekonomian Nasional pada tahun 2010 sudah mulai pulih. Sehingga pertumbuhan ekonomi Nasional pada tahun tersebut mampu tumbuh menjadi sebesar 6,22%. Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera selama periode 2007-2012 selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional pada tahun 2010 juga mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 5,58%. Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada tahun 2011 yang terus meningkat menjadi 6,19% ternyata belum mampu menyaingi pertumbuhan Nasional yang tumbuh 6,49%.

Telah lama timbul kesadaran bahwa kawasan Sumatera memiliki potensi besar untuk berkembang dan maju melebihi kemajuan yang telah dicapai oleh pulau Jawa. Namun potensi besar ini hanya sekedar menjadi hiasan bibir dan goresan tulisan di kertas-kertas rancangan semata, jika tidak ada gerak aksi nyata untuk mewujudkannya. Untuk meraih kemajuan yang hakiki diperlukan kerjasama yang erat dan nyata antara propinsi-propinsi di Sumatera. Ada sepuluh propinsi di sana, Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Bangka-Belitung, Sumsel dan Lampung. (Bachtiar, 2102). Dilihat dari struktur ekonomi Pulau Sumatera, terdapat empat sektor utama yang memiliki peranan penting yaitu Sektor Pertanian (22,27%), Sektor Industri (20,24%), Sektor Pertambangan (15,95%), dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (14,86%) berarti keempat sektor tersebut peranannya sebesar 73,32%. Sementara peranan sektor yang terkait dengan infrastruktur hanya sebesar 13,75% yang terdiri dari Sektor Listrik Gas dan Air Bersih (0,57%), Sektor Kontruksi (6,27%), dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi (6,91%).



Gambar 2 : Struktur Ekonomi Sumatera Tahun 2011

Menurut Menteri BUMN Dahlan Iskan Pulau Sumatera berpotensi untuk maju pesat. Hanya perlu dipersiapkan infrastruktur pendukung seperti listrik, pelabuhan, dan bandara. Sumatera memiliki segalanya seperti geothermal, migas, batubara, dan lain-lain. Ini merupakan pulau yang besar dengan penduduk yang cukup. Selain itu dekat dengan negara maju seperti Singapura dan Malaysia. (Daniel, 2013). Daya Saing Pulau Sumatera akan mengalami penurunan bila perkembangan ekonomi yang terjadi tidak didukung oleh perkembangan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Karena daya saing suatu wilayah diantaranya diukur dari ketersediaan infrastruktur (Irawati, dkk. 2008). Sebaliknya apabila ketersediaan infrastruktur di Pulau Sumatera mampu ditingkatkan lagi, maka perekonomian Pulau Sumatera akan mampu berkontribusi yang lebih besar lagi terhadap perekonomian Nasional.

Karena begitu pentingnya peranan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, maka berdasarkan hasil Rakor Gubernur se-Sumatera yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Maret 2013 di Bandar Lampung dalam rangka pelaksanaan Rakor MP3EI Koridor Ekonomi Sumatera, terdapat beberapa kesepakatan dalam rangka meningkatkan ketersediaan infrastruktur di Pulau Sumatera antara lain (Menko Perekonomian, 2013) : (a) Realisasi persiapan pembangunan kawasan strategis dan infrastruktur Jembatan Selat Sunda, (b) Percepatan pembangunan Jalan Tol Sumatera sepanjang 2.700 km, (c) Percepatan pembangunan jalur kereta api Lampung-Aceh sepanjang 2.900 km, (d) Peningkatan status Bandara domestik, (e) Percepatan pemenuhan energi listrik berbasis panas bumi.

Disisi lain, tingginya kebutuhan infrastruktur, tidak diikuti oleh kemampuan yang cukup untuk menyediakan sumber pendanaan bagi pembangunan infrastruktur. Setelah otonomi daerah, pembangunan infrastruktur bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah Daerah. Namun, pendanaan daerah untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas, sehingga sampai saat ini pendanaan infrastruktur dasar di daerah masih mengandalkan sumber pembiayaan dari APBN yang ditransfer ke APBD. Padahal infrastruktur merupakan salah satu stimulus utama pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk dikaji ketersediaan infrastruktur di Pulau Sumatera terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Analisis ini meliputi seluruh wilayah yang terdapat di Pulau Sumatera yang terdiri dari sepuluh provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Dalam penelitian ini data yang digunakan terutama bersumber dari BPS dan Kementerian Pekerjaan Umum.

C. Metode Analisis

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif yaitu menjelaskan perilaku dari variabel yang diamati. Generalisasi terhadap perilaku variabel diantaranya dengan menggunakan nilai sentral (mean, median dan modus), deviasi standar dan kemencengan distribusi. Selain itu, dalam melihat perkembangan data dari waktu ke waktu digunakan pendekatan pertumbuhan. Variabel yang dianalisis meliputi :

Jenis Infrastruktur	Variabel	Satuan
Jalan	Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Status Kewenangan	Km
	Kondisi Jalan Nasional Menurut Provinsi	Km
Listrik	Pelanggan Rumah Tangga	RT
	Rasio Elektrifikasi	%
Telekomunikasi	Konsumsi Listrik/Kapita	KWH
	Wilayah Pelanggan Telpon Kabel	Desa
Air Bersih	Wilayah Penerimaan Sinyal HP : - Sinyal Lemah - Sinyal Kuat	Desa
	Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat : - PAM/PDAM - Pompa Listrik/Tangan/Sumur - Mata Air - Sungai/Danau/Kolam - Air Hujan - Air Kemasan/Lainnya	Desa

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Infrastruktur Jalan

Jalan merupakan urat nadi perekonomian yang menghubungkan kegiatan ekonomi antar wilayah sehingga distribusi barang dan jasa dapat bergerak dengan lancar. Infrastruktur jalan pada umumnya merupakan barang publik dan kurang menarik bagi sektor swasta untuk menyediakannya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Sampai dengan tahun 2010 panjang jalan di Pulau Sumatera sepanjang 161.326 Km atau bertambah sepanjang 11.421 Km dibandingkan tahun 2008 yaitu 149.905. Artinya antara tahun 2008 sampai dengan 2010 rata-rata setiap tahunnya di Pulau Sumatera panjang jalan tumbuh sebesar 3,81%.

Tabel 1 : Panjang Jalan di Pulau Sumatera Menurut Provinsi Tahun 2008 dan 2010

NO.	PROVINSI	2008	2010
1	Aceh	18.902	20.795
2.	Sumatera Utara	37.522	35.448
3.	Sumatera Barat	18.218	20.763
4.	Riau	24.471	23.450
5.	Jambi	10.477	10.372
6.	Sumatera Selatan	15.052	16.635
7.	Bengkulu	5.922	7.811
8.	Lampung	14.903	17.003
9.	Kep. Babel	4.438	4.526
10.	Kepulauan Riau		4.523
	SUMATERA	149.905	161.326

Sumber : Ditjen Bina Marga, Kementerian PU

Hasil penelitian Taryono (2013), menunjukkan pentingnya sarana dan prasarana infrastruktur bagi masyarakat ternyata tidak dibarengi dengan penganggaran yang memadai. Misalnya, Peranan belanja langsung terutama untuk belanja modal, barang dan jasa yang penting bagi penyediaan infrastruktur terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 2007 ratio belanja langsung terhadap APBD sebesar 60,91% kemudian pada tahun 2012 peranan belanja langsung menjadi 41,30%.

Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, industrialisasi bahkan terhadap pembangunan manusia. Lin dan Liu (2000), menemukan adanya korelasi yang kuat antara *share* (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya Amir dan Nazara (2005) menyebutkan bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai akan mampu mendorong industrialisasi yang lebih tinggi lagi. Lebih jauh lagi hasil penelitian Mauriza, dkk (2013) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur juga berpengaruh positif dalam meningkatkan *Human Development Index*. Dalam upaya meningkatkan penyediaan infrastruktur terutama jalan di Indonesia bukan hanya disediakan oleh pemerintah pusat tapi juga oleh pemerintah daerah. Sehingga kewenangannya dapat dibagi menjadi 3 yaitu jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Panjang jalan negara selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 di Pulau Sumatera bertambah sepanjang 980 Km. Sehingga panjang jalan negara di Pulau Sumatera meningkat dari 10.588 Km pada tahun 2008 menjadi sepanjang 11.568 Km pada tahun 2010.

Tabel 2 : Panjang Jalan Negara di Pulau Sumatera Menurut Provinsi Tahun 2008 dan Tahun 2010

NO.	PROVINSI	2008	2010
1.	Aceh	1.783	1.803
2.	Sumatera Utara	2.098	2.250
3.	Sumatera Barat	1.200	1.213
4.	Riau	1.126	1.134
5.	Jambi	820	936
6.	Sumatera Selatan	1.290	1.444
7.	Bengkulu	736	784
8.	Lampung	1.004	1.160
9.	Kep. Babel	531	510
10.	Kepulauan Riau		334
	SUMATERA	10.588	11.568

Sumber : Ditjen Bina Marga, Kementerian PU

Menurut Indrawan (2008), ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu hal yang harus diprioritaskan Pemerintah dalam meningkatkan peranan dunia usaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang rendah, mengakibatkan kemampuan Pemerintah membangun dan memelihara infrastruktur ekonomi menurun. Dunia usaha sangat bergantung terhadap infrastruktur, terutama infrastruktur transportasi, jalan umum dan tol, air bersih dan sumber energi listrik, bahan bakar minyak dan gas. Pada saat ini ketersediaan, kontinuitas dan kualitas pasokan produk dan jasa infrastruktur dewasa ini banyak mengalami masalah dan hambatan dalam mendukung operasi bisnis dunia usaha. Dalam mengatasi hal tersebut sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi telah dibangun dan dilakukan pemeliharaan jalan sepanjang 15.247 Km pada tahun 2010. Pembangunan dan pemeliharaan jalan yang menjadi kewenangan provinsi jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu 14.750 Km atau selama periode tersebut jalan provinsi bertambah sepanjang 497 Km.

Tabel 3 : Panjang Jalan Provinsi di Pulau Sumatera Menurut Provinsi Tahun 2008 dan Tahun 2010

NO.	PROVINSI	2008	2010
1.	Aceh	1.702	1.702
2.	Sumatera Utara	2.752	2.752
3.	Sumatera Barat	1.131	1.154
4.	Riau	1.796	1.872
5.	Jambi	1.525	1.025
6.	Sumatera Selatan	1.621	1.748
7.	Bengkulu	1.357	1.563
8.	Lampung	2.355	2.368
9.	Kep. Babel	511	551
10.	Kepulauan Riau		512
	SUMATERA	14.750	15.247

Sumber : Ditjen Bina Marga, Kementerian PU

Sesuai dengan kewenangannya pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur jalan yang menghubungkan antar wilayah di tingkat kabupaten/kota. Panjang jalan kabupaten/kota pada tahun 2008 di Pulau Sumatera sepanjang 124.567 Km dan meningkat menjadi 134.511 Km pada tahun 2010 atau selama periode tersebut panjang jalan kabupaten/kota di Pulau Sumatera bertambah sepanjang 9.944 Km.

Tabel 4 : Panjang Jalan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Menurut Provinsi Tahun 2008 dan 2010

NO.	PROVINSI	2008	2010
1.	Aceh	15.417	17.290
2.	Sumatera Utara	32.672	30.446
3.	Sumatera Barat	15.887	18.396
4.	Riau	21.549	20.444
5.	Jambi	8.132	8.411
6.	Sumatera Selatan	12.141	13.443
7.	Bengkulu	3.829	5.464
8.	Lampung	11.544	13.475
9.	Kep. Babel	3.396	3.465
10.	Kepulauan Riau		3.677
	SUMATERA	124.567	134.511

Sumber : Ditjen Bina Marga, Kementerian PU

Ketersediaan infrastruktur jalan dalam mendukung pembangunan wilayah bukan hanya diukur dari kuantitasnya namun lebih penting lagi dari sisi kualitas. Panjang jalan nasional pada tahun 2010 sepanjang 38.189,43 Km, dari panjang jalan tersebut 24,78% atau 11.463,75 Km berada di Pulau Sumatera. Dari jalan nasional yang terdapat di Pulau Sumatera sepanjang 1.326,61 Km atau 11,57% dalam kondisi tidak mantap. Kondisi jalan yang tidak mantap tersebut dalam kondisi rusak berat sebesar 46,91% dan rusak ringan sebesar 53,09%. Kondisi jalan yang tidak mantap jika tidak segera diperbaiki dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera.

Tabel 5 : Kondisi Jalan Nasional Menurut Provinsi Tahun 2010

No.	Provinsi	Panjang Jalan Nasional (Km)	Kualitas Jalan Nasional					
			Panjang Jalan Mantap		Panjang Jalan Tidak Mantap		Komposisi Jalan Tidak Mantap	
			(Km)	(%)	(Km)	(%)	% Rusak Ringan	% Rusak Berat
1.	Aceh	1.803,36	1.667,56	92,47	135,8	7,53	33,63	66,37
2.	Sumut	2.224,51	1.667,91	74,98	556,6	25,02	46,72	53,28
3.	Sumbar	1.212,88	1.103,21	90,96	109,67	9,04	76,46	23,55
4.	Riau	1.082,12	954,77	88,23	127,35	11,77	62,39	37,61
5.	Kep. Riau	333,99	264,77	79,27	69,22	20,73	15,88	84,12
6.	Jambi	936,48	824,23	88,01	112,25	11,99	68,73	31,27
7.	Bengkulu	782,87	728,67	93,08	54,2	6,92	55,61	44,39
8.	Sumsel	1.418,38	1.400,49	98,74	17,89	1,26	85,69	14,31
9.	Babel	509,59	508,31	99,75	1,28	0,25	85,94	14,06
10.	Lampung	1.159,57	1.017,22	87,72	142,35	12,28	70,64	29,36
	Sumatera	11.463,75	10.137,14	88,43	1.326,61	11,57	53,09	46,91
	Indonesia	38.189,43	31.522,09	82,54	6.667,34	17,46	48,28	51,72

Sumber : Monitoring Data IRMS Berdasarkan Roughness Tahun Anggaran 2010. Direktorat Jenderal Bina Marga (Status 18 Agustus 2010)

B. Infrastruktur Listrik

Seiring dengan perkembangan ekonomi Pulau Sumatera yang terus tumbuh, kebutuhan listrik sebagai sumber energi bagi kegiatan industri dan lainnya terus meningkat. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan energi listrik di Pulau Sumatera telah menyebabkan beberapa wilayah di Sumatera mengalami krisis listrik. Jumlah pelanggan listrik di Pulau Sumatera selama periode 2009 sampai dengan 2011 tumbuh sebesar 19,29% dari sebanyak 7.048.241 pada tahun 2009 meningkat menjadi sebanyak 8.407.689 pelanggan listrik rumah tangga. Menurut satuan PLN/provinsi terbanyak berada pada wilayah Sumatera Utara yaitu 2.290474 pelanggan pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 2.511.003 pelanggan pada tahun 2011. Laju pertumbuhan pelanggan listrik rumah tangga tertinggi terjadi di wilayah Bangka Belitung dengan laju pertumbuhan pelanggan listrik sebesar 58,29%.

Tabel 6 : Jumlah Pelanggan Listrik Rumah Tangga di Pulau Sumatera Tahun 2009 dan Tahun 2011

SATUAN PLN/PROVINSI	2009	2011	LAJU (%)
Wilayah Aceh	853.659	951.165	11,42
Wilayah Sumatera Utara	2.290.474	2.511.003	9,63
Wilayah Sumatera Barat	775.637	860.130	10,89
Wilayah Riau	575.003	778.161	35,33
- Riau	479.841	655.068	36,52
- Kepulauan Riau	95.162	123.093	29,35
Wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu	1.369.350	1.726.583	26,09
- Sumatera Selatan	947.325	1.197.649	26,42
- Jambi	206.414	258.184	25,08
- Bengkulu	215.611	270.750	25,57
Wilayah Bangka Belitung	127.830	202.340	58,29
Wilayah Lampung	877.400	1.182.013	34,72
PT PLN Batam	178.888	196.294	9,73
Sumatera	7.048.241	8.407.689	19,29

Sumber: Hasil Pengolahan data PT. PLN 2012

Seiring dengan meningkatnya pelanggan listrik baik rumah tangga maupun industri permintaan akan konsumsi listrik juga meningkat. Konsumsi listrik di wilayah Sumatera selama periode 2009 sampai 2011 meningkat sebesar 333,50 KWH dari sebesar 4.119,76 KWH pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 4.453,26 KWH. Hampir seluruh wilayah di Sumatera konsumsi listriknya meningkat kecuali pada wilayah Batam, konsumsi listrik di wilayah ini mengalami penurunan sebesar 124,91 KWH . Permintaan konsumsi listrik yang terus meningkat belum diikuti oleh penggunaan sumber energi listrik alternatif. Sampai saat ini, pemanfaatan energi alternatif, terutama panas bumi, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena harganya belum kompetitif serta biaya investasi yang relatif besar, disamping adanya tumpang tindih lahan antara lapangan panas bumi dengan kawasan hutan (Bappenas, 2013).

Tabel 7 : Konsumsi Listrik (KWH Jual/Kapita) di Pulau Sumatera Tahun 2009 dan Tahun 2011

SATUAN PLN/PROVINSI	2009	2011	Δ (11-09)
Wilayah Aceh	292,53	343,54	51,01
Wilayah Sumatera Utara	460,2	548,84	88,64
Wilayah Sumatera Barat	415,6	489,82	74,22
Wilayah Riau	361,47	436,38	74,91
- Riau	336,58	411,42	74,84
- Kepulauan Riau	541,41	620,1	78,69
Wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu	310,23	360,67	50,44
- Sumatera Selatan	367,57	390,19	22,62
- Jambi	209,9	332,55	122,65
- Bengkulu	232,39	283,41	51,02
Wilayah Bangka Belitung	350,36	424,33	73,97
Wilayah Lampung	270,16	315,38	45,22
PT PLN Batam	1.659,21	1.534,30	-124,91
Sumatera	4.119,76	4.453,26	333,50

Sumber: Hasil Pengolahan data PT. PLN 2012

Tingkat persebaran listrik antardaerah di Pulau Sumatera masih belum merata. Sebagai contoh, rasio elektrifikasi di wilayah Riau baru mencapai 57,39% demikian juga di wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu baru mencapai 56,68% sedangkan wilayah lainnya rasio elektrifikasinya sudah jauh lebih tinggi. Dalam upaya meningkatkan elektrifikasi pengembangan berbagai sumber-sumber energi listrik terus dilakukan. Sehingga ratio elektrifikasi di wilayah Riau yang rendah sampai dengan 2011 mampu ditambah sebesar 16,8% dan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu mampu ditambah sebesar 7,55%. Wilayah di Sumatera dengan ratio elektrifikasi yang tinggi antara lain Aceh sebesar 87,21%, Sumatera Utara sebesar 80,11%, Sumatera Barat sebesar 76,21%. Pertambahan ratio elektrifikasi di Sumatera pada wilayah kerja PLN selama periode 2009 sampai dengan 2011 tertinggi adalah pada wilayah Bangka Belitung dengan pertambahan elektrifikasi sebesar 20,62%

Tabel 8 : Rasio Elektrifikasi di Pulau Sumatera Tahun 2009 dan 2011 (Persen)

SATUAN PLN/PROVINSI	2009	2011	Δ (11-09)
Wilayah Aceh	87,76	87,21	-0,55
Wilayah Sumatera Utara	76,81	80,11	3,3
Wilayah Sumatera Barat	67,21	76,21	9
Wilayah Riau	40,59	57,39	16,8
- Riau	38,88	54,8	15,92
- Kepulauan Riau	52,17	76,64	24,47
Wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu	49,13	56,68	7,55
- Sumatera Selatan	56,11	65,18	9,07
- Jambi	29,9	32,74	2,84
- Bengkulu	52,74	64,48	11,74
Wilayah Bangka Belitung	45,56	66,18	20,62
Wilayah Lampung	47,75	61,88	14,13
PT PLN Batam	78,76	69,14	-9,62

Sumber: Hasil Pengolahan data PT. PLN 2012

Permasalahan pokok dibidang ketenaga listrikan di Indonesia yaitu (1) masih belum tertanganinya krisis listrik di beberapa wilayah termasuk di Pulau Jawa; (2) rasio elektrifikasi yang masih rendah baru mencapai 64,3% dan desa berlistrik baru mencapai sekitar 91,9%; (3) ketimpangan distribusi kebutuhan listrik masyarakat dan industri, yaitu 80% berada di sistem Jawa- Madura-Bali (Jamali) dan 20% berada di luar sistem Jamali; (4) keterbatasan kemampuan, baik keuangan pemerintah maupun korporat dalam menjaga kesinambungan investasi pembangunan fasilitas ketenagalistrikan; (5) tarif dasar listrik (TDL) yang belum ditetapkan sesuai dengan nilai keekonomiannya sehingga dinilai kurang menjamin pengembalian investasi; (6) masih lemahnya efisiensi pengelolaan sistem ketenagalistrikan nasional; (7) lemahnya koordinasi pasokan energi primer untuk pembangkit tenaga listrik antara produsen dan Perusahaan Listrik Negara; (8) tingginya biaya operasi pembangkitan yang diakibatkan oleh tingginya harga bahan bakar; serta (9) tarif listrik belum mencapai nilai ekonominya menyebabkan Perusahaan Listrik Negara belum mampu *self financing* untuk melaksanakan investasi fasilitas ketenagalistrikan (Pidato Presiden, 15 Agustus 2008).

C. Infrastruktur Telekomunikasi

Belum seluruh wilayah di Pulau Sumatera dapat mengakses sarana telekomunikasi terutama telpon kabel dan Handpone. Jumlah desa/kelurahan di Pulau Sumatera pada tahun 2011 sebanyak 24.213 desa/kelurahan, dari jumlah tersebut baru sebanyak 3.884 desa atau sekitar 16 persen yang dapat akses dengan menggunakan telpon kabel.

Tabel 9 : Jumlah Desa di Pulau Sumatera yang ada pelanggan Telpon Kabel 2011

NO.	PROVINSI	ADA PELANGGAN TELPON KABEL	
		Σ DESA	%
1.	Aceh	714	11
2.	Sumatera Utara	1026	17,7
3.	Sumatera Barat	391	37,9
4.	Riau	210	12,7
5.	Jambi	180	13,1
6.	Sumatera Selatan	480	15,1
7.	Bengkulu	215	14,2
8.	Lampung	469	19
9.	Kep. Bangka Belitung	99	27,4
10.	Kepulauan Riau	100	28,3
	SUMATERA	3.884	16

Sumber: Hasil Pengolahan data PODES 2011 (BPS)

Desa/kelurahan di Pulau Sumatera yang dapat menerima sinyal HP pada tahun 2011 sebanyak 23.315 desa/kelurahan atau 96,29%. Ini artinya di Pulau Sumatera masih ada sekitar 3,71% desa/kelurahan yang belum dapat menikmati komunikasi dengan menggunakan HP. Desa yang dapat menerima sinyal HP dapat dikelompokkan kedalam desa yang dapat menerima sinyal kuat dan desa yang menerima sinyal lemah. Pada tahun 2011 sebanyak 17.091 desa/kelurahan atau 70,60% yang dapat menerima sinyal HP dengan kuat dan sebanyak 6.197 desa/kelurahan atau 25,60% dapat menerima sinyal HP dengan lemah.

Tabel 10 : Jumlah Desa di Pulau Sumatera Yang Dapat Menerima Sinyal HP Tahun 2011

No.	Provinsi	Penerima Sinyal HP						Jumlah Desa/Kel
		Sinyal Lemah		Sinyal Kuat		Lemah-Kuat		
		Σ Desa	%	Σ Desa	%	Σ Desa	%	
1.	Aceh	1.486	22,9	4.803	74,1	6.289	97	6.483
2.	Sumatera Utara	1.520	26,2	3.891	67,1	5.411	93,3	5.797
3.	Sumatera Barat	236	22,8	751	72,7	1.014	98,2	1.033
4.	Riau	430	26	1.172	70,8	1.602	96,8	1.655
5.	Jambi	397	28,9	918	66,9	1.315	95,8	1.372
6.	Sumatera Selatan	994	31,2	2.119	66,5	3.113	97,7	3.186
7.	Bengkulu	376	24,9	1.097	72,7	1.473	97,6	1.509
8.	Lampung	645	26,2	1.762	71,5	2.407	97,7	2.464
9.	Kep. Bangka Belitung	41	11,4	318	88,1	359	99,4	361
10.	Kepulauan Riau	72	20,4	260	73,7	332	94,1	353
	SUMATERA	6.197	25,6	17.091	70,6	23.315	96,3	24.213

Sumber: Hasil Pengolahan data PODES 2011 (BPS)

D. Infrastruktur Air Bersih

Diperlukan investasi yang signifikan pada bidang air bersih dan sanitasi. Ketidackucupan pelayanan air bersih dan sanitasi menghalangi status Indonesia sebagai negara dengan penghasilan menengah, melemahkan daya saing kota-kotanya, dan sangat mempengaruhi kehidupan rakyat, Word Bank (2010). Pada wilayah Sumatera sebagian besar 62% desa dengan sumber air bersih untuk kebutuhan domestik masyarakat bersumber dari air Pompa Listrik/Tangan/Sumur. Sumber air bersih dari mata air juga masih menjadi pilihan bagi 3.156 desa/kelurahan yang terdapat di Pulau Sumatera. Terjadinya degradasi lingkungan seperti pencemaran air sungai dan danau tidak mengurangi keinginan masyarakat untuk menggunakan sumber air bersih dari sungai/danau/kolam untuk kebutuhan domestiknya. Kondisi ini tercermin dari sebanyak 1.569 desa/kelurahan di Pulau Sumatera masih menggunakan sumber air dari sungai/danau/kolam untuk kebutuhan domestiknya.

Tabel 11 : Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2010

Provinsi	PAM/PDAM		Pompa Listrik/Tangan/Sumur		Mata Air		Sungai/Danau/Kolam		Air Hujan		Air Kemasan/Lainnya		Total	
	Σ Desa	%	Σ Desa	%	Σ Desa	%	Σ Desa	%	Σ Desa	%	Σ DESA	%	Σ DESA	%
Aceh	573	9	4.489	69	736	11	306	5	60	1	319	5	6.483	100
Sumut	677	12	2.778	48	1.530	26	492	8	214	4	106	2	5.797	100
Sumbar	312	30	430	42	194	19	46	4	15	1	36	3	1.033	100
Riau	22	1	985	60	20	1	65	4	452	27	111	7	1.655	100
Jambi	260	19	741	54	54	4	165	12	117	9	35	3	1.372	100
Sumsel	284	9	2.058	65	176	6	361	11	245	8	62	2	3.186	100
Bengkulu	165	11	1.098	73	152	10	77	5	4	0	13	1	1.509	100
Lampung	95	4	2.051	83	181	7	52	2	52	2	33	1	2.464	100
Kep. Babel	4	1	304	84	8	2	3	1	0	0	42	12	361	100
Kep. Riau	39	11	170	48	105	30	2	1	6	2	31	9	353	100
SUMATERA	2.431	10	15.104	62	3.156	13	1.569	6	1.165	5	788	3	24.213	100

Sumber: Hasil Pengolahan data PODES 2011 (BPS)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Rata-rata setiap tahunnya panjang jalan di Pulau Sumatera tumbuh sebesar 3,81%. Selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 panjang jalan negara bertambah 980 Km, jalan provinsi bertambah sepanjang 497 Km, jalan kabupaten/kota bertambah sepanjang 9.944 Km. Sehingga ketersediaan infrastruktur jalan di Pulau Sumatera pada tahun 2010 sepanjang 161.326 Km.
2. Jumlah pelanggan listrik di Pulau Sumatera selama periode 2009-2011 tumbuh sebesar 19,29% sehingga pada tahun 2011 sebanyak 8.407.689 pelanggan listrik rumah tangga. Konsumsi listrik meningkat sebesar 333,50 KWH/kapita seiring dengan meningkatnya pelanggan listrik baik rumah tangga maupun industri. Namun, persebaran listrik antardaerah di Pulau Sumatera masih belum merata, misalnya rasio elektrifikasi di wilayah Riau baru mencapai 57,39% demikian juga di wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu baru mencapai 56,68% sedangkan wilayah lainnya rasio elektrifikasinya sudah jauh lebih tinggi.
3. Belum seluruh wilayah di Pulau Sumatera dapat mengakses dengan menggunakan telpon kabel maupun Handpone. Dari sebanyak 24.213 desa/kelurahan pada tahun 2011, baru sebanyak 3.884 desa/kelurahan yang terdapat telpon kabel. Demikian juga dengan HP masih ada sekitar 3,71% desa/kelurahan belum dapat mengakses sinyal HP.
4. Pada umumnya di wilayah Sumatera (62%) desa menggunakan Pompa Listrik/Tangan/Sumur sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan domestik masyarakat.

B. Saran

Pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, telekomunikasi dan air bersih terutama untuk mengkoneksikan wilayah pusat-pusat pertumbuhan guna meningkatkan kegiatan investasi. Selain itu, dalam upaya penyediaan infrastruktur antarwilayah di Pulau Sumatera aspek pemerataan harus tetap menjadi pertimbangan sehingga dapat mengurangi ketimpangan infrastruktur antarwilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir H dan Suahasil Nazara, 2005. *Analisis Perubahan Struktur Ekonomi (Economic Landscape) dan Kebijakan Strategi Pembangunan Jawa Timur Tahun 1994 dan 2000: Analisis Input-Output*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Edisi Januari 2005
- Bachtiar D, 2012. *Visi baru pembangunan sumatera*. KOMPASIANA : 7 Maret 2102. 03:27.
- Bappenas, 2013. *Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014*.
- Daniel W, 2013. *Dahlan: Sumatera Bisa Maju, Tinggal Listrik & Infrastruktur Disiapkan*. detikFinance. Sabtu, 04/05/2013 11:17 WIB.
- Indrawan MI, 2008. *Analisis Kondisi Infrastruktur Perekonomian Terhadap Produktivitas Dunia Usaha Kota Medan*. Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu : Vol. 1 No.1 September 2008 ISSN : 1979 – 5408.
- Irawati I, Zulfadly Urufi, Renato Everardo Isaias Rezza Resobeoen, Agus Setiawan, dan Aryanto, 2008. *Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Serta Variabel Sumber Daya Manusia Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jurusan Teknik Planologi Institut Teknologi Nasional, Bandung. Prosiding INSAHP5 © Teknik Industri UNDIP Semarang, 14 Mei 2008 ISBN : 978-979-97571-4-2 C 15 – 1
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2013. *Laporan Perkembangan Pelaksanaan MP3EI Koridor Ekonomi Sumatera : Koridor Ekonomi Sumatera Memiliki Tema Pembangunan Sebagai Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional*.
- Mauriza S, Abu Bakar Hamzah, Mohd. Nur Syechalad. 2013. *Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Propinsi Aceh*. Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302-0172 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 15 Pages pp. 29- 43 29 - Volume 1, No. 2, Mei 2013
- Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Serta Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 Beserta Nota Keuangannya Di Depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Jakarta, 15 Agustus 2008.
- Taryono, 2013. *Analisis Struktur Apbd Kabupaten Kampar Tahun 2007-2012*. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun III No. 8, Maret 2013 : 123 – 140. ISSN : 2087-4502.
- Word Bank, 2010. *Bangkitnya Indonesia : Prioritas Kebijakan Untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya “Aliran Dana Aliran Air”*.